

BAB IV

PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan juga saran dari penulis terhadap penelitian ini.

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang penulis peroleh dari hasil penelitian yang berjudul “Strategi *public relations* Pemerintah Kabupaten Karo dalam membentuk citra positif” adalah sebagai berikut :

1. Strategi PR yang dilakukan Humas Pemkab Karo dalam membentuk citra positif yaitu *media relations*. Strategi *media relations* maksudnya disini adalah melakukan pendekatan dengan media massa. Dengan *media relations* diharapkan pemberitaan negatif mengenai Pemkab Karo berkurang atau tidak ada sama sekali melainkan berita-berita positif sehingga citra positif dapat terbentuk. Humas Pemkab Karo menyadari bahwa peranan media massa sangatlah penting bagi kemajuan Pemerintah Kabupaten Karo.
2. Dalam menentukan strategi *media relations* tersebut, Humas yang dibawah Dinas Kominfo dan PDE Kabupaten Karo menggunakan empat tahap perencanaan strategi yakni riset strategi, strategi, taktik dan riset evaluasi. Taktik yang dipilih humas adalah program satuan harga jasa Pemkab Karo Tahun anggaran 2012, Pemkab Karo memberi uang penyemangat kepada wartawan yang menulis berita yang sifatnya membangun atau mempromosikan Pemkab karo. Selain taktik tersebut, taktik komunikasi lainnya merupakan taktik komunikasi yang telah disusun Dinas Kominfo

dan PDE Kabupaten Karo yaitu anggaran pada tahun 2010 yaitu *press conference, press release, press tour, press receptions, press statement* dan dokumentasi dan kliping.

3. Pencitraan yang diinginkan adalah Bupati Karo sebagai pemimpin yang berkualitas dan Kabupaten Karo yang berbasis pembangunan pertanian dan pariwisata, juga mempromosikan Kabupaten Karo untuk mendatangkan wisatawan sehingga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

B. Saran

Selama penulis melakukan observasi secara langsung sampai menyelesaikan skripsi ini, penulis memberikan saran-saran yang berhubungan dengan strategi dan kegiatan pada Humas Pemkab Karo. Berikut saran-saran yang penulis berikan :

1. Strategi *public relations* dapat membantu humas dalam memilih tindakan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penting bagi Humas untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan strategi *public relations*.
2. Humas Pemkab Karo sebaiknya diberikan wewenang secara khusus untuk menentukan strategi yang digunakan dalam membentuk citra positif, tidak dibatasi berdasarkan anggaran dan Tupoksi yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Arifin. 2003. *Strategi Komunikasi*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
- Abdurachman, oemi, M.A. 1993. *Dasar-dasar Public Relations*. Citra Aditya Bhakti : bandung.
- Caywood, Clarke L., Ph.d, Ed. 1997. *The Handbook of Strategic Public Relations & Integrated Communications*. U.S.A: McGraw-Hill.
- Cutlip, Center & Broom, G.M. 2006. *Effective Public Relations*. Edisi 9. Prentice Hall International Inc.: New jersey.
- Effendy, Onong Uchjana. 1995. *Ilmu Komunikasi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Heath, R.L., Nelson, R.A. 1986. *Issue Management*. Newbury Park.
- Iriantara, Yosol. 2005. *Media Relations*. Bandung : Simbiosis Rekatma Media.
- Kasali, Rhenald. 2003. *Manajemen Public Relations: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- . 2008. *Riset Kualitatif*. Bandung : Bentang Pustaka.
- Kriyantono, Rachmat, 2007. *Teknis Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Matthew B.Miles and A.Michael Huberman. 1992. *Analisa Data Kualitatif*, terj. Tjetjep Rohindi. Jakarta : UI Press
- Mintzberg, H. Quinn B.C. 1991. *The Strategy, concepts, Contents, Cases*. 2nd ed. New Jersey: Prantice Hall Inc.

Moore, Frazier. 2004. *Humas Membangun Citra Dengan Komunikasi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Rahmadi, F, 1994, *Public Relations dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Gramedia

Rakhmat, Jalanuddin. 1991. *Metode Penelitian Komunikasi*. CV Remaja Rosdakarya: Bandung.

Regester, Michael, Judy Larkin. 2003. *Risk Issues and Crisis Management in Public Relations*. New Delhi: Crest Publishing House.

Ruslan, Rosady. 2007. *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi: Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta :PT RajaGrafindo.

Smith, D. Ronald. 2002. *Strategic Planning For Public Relations*. 2nd ed. London: Lawrence Erlbaum Associates Publisher.

Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 49.

Surakhman, Winarno. 1990. *Pengantar penelitian Kualitatif*. Surakarta.

Wardhani, Diah. 2008. *Media Relations Sarana Membangun Reputasi Organisasi*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Widjaja. 1997. *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*. Jakarta : Bumi Aksara

Wongsonagoro, Maria. 1995. “*Crisis Management & Issues Management*” (*The Basics of Public Relations*). Jakarta: IPM Public Relations.

Tulisan Ilmiah Tidak Dipublikasikan

Rievera Dea melita. 2010. *Skripsi, “Strategi Public Relations Larissa Aesthetic Center Yogyakarta Dalam Mempertahankan Citra Positif”*.

Klara Esti Asihing. 2012. *Skripsi, "Strategi Komunikasi Edukasi Pertanian Ramah Lingkungan Di Gubug Selo Merapi"*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dian Natalia Puteri. 2012. *Skripsi "Strategi Public Relations Politik Dalam Pencitraan Bupati"*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Internet

http://massofa.wordpress.com/2008/03/02/birokrasi-pemerintahan/10_Maret_2012/08.45

<http://repository.ui.ac.id/contents/koleksi/16/1ceef3eb85674d4377b47a3b13b2eb42504551a4.pdf> 10 Maret 2012/10.40

http://rimaru.web.id/pengertian-pemerintahan-daerah-menurut-undang-undang-nomor-32-tahun-2004/19_Mei_2012/19.00

http://nuril.wordpress.com/2008/06/12/menjaga-image-pemerintah-dengan-pengalihan-isu/07_Juni_2012,_08.00_WIB

http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/27293/BAB%20II%20Tinjauan%20Pustaka_%20IInno.pdf?sequence=5 07 Juni 2012, 11.00 WIB



LAMPIRAN

1. Berita tentang Keabsahan Ijazah Bupati Karo

Sumut - Rabu, 09 Mei 2012 00:15 WIB

Rapat Dengar Pendapat Alot

DPRD Sepakat Tuntaskan Keabsahan Ijazah Bupati Karo



(Analisa/ b bersih g munthe). Keterangan gambar : Ketua KPUD Karo Binyamin Pinem berdampingan dengan Kapolres Tanah Karo AKBP Marcelino Sampouw SH SIK MT memberikan penjelasan tentang keabsahan ijazah Bupati Karo dalam rapat dengar pendapat di aula Paripurna DPRD Karo.

Kabanjahe,(Analisa). Rapat dengar pendapat di gedung DPRD Karo soal keabsahan ijazah Kena Ukur Karo Jambi Surbakti yang saat ini menjabat Bupati Karo, pada masa pencalonannya pada Pilkada Karo tahun 2010 berlangsung alot dan sempat memanas, Senin (7/5).

Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Karo Effendy Sinukaban SE didampingi Wakilnya Ferianta Purba SE dan Onasis Sitepu ST, juga dihadiri puluhan masyarakat tergabung dalam Aliansi Masyarakat Karo (AMK), Ketua LSM KPKP Ikuten Sitepu, Ketua LSM Panji Demokrasi Cici Ardy, Ketua KPUD Karo Benyamin Pinem ST dan LSM Kandi-Kandi dipimpin ketuanya Ica Karina Br Sembiring, Kapolres Tanah Karo AKBP Marcelino Sampouw SH SIK MT mewakili Kapolda Sumut.

Ketua LSM KPKP Karo Ikuten Sitepu mengatakan, pada masa pencalonannya sebagai calon Bupati Karo pada Pilkada tahun 2010, Kena Ukur Karo Jambi Surbakti sama sekali tidak memiliki ijazah mulai dari tingkat SD, SMP dan SMK dan hanya sebatas surat keterangan pengganti ijazah yang disampaikan ke KPUD Karo.

Surat pengganti ijazah dengan nomor 422.1/292 diterbitkan SD Negeri No 040487 Tiga Derket yang ditandatangani Kepsek Teringet Aku Ginting dan dinyatakan lulus pada tahun 1962. Dalam surat pengganti ijazah itu, Nama Kena Ukur/Pa Korbet Surbakti. Pada SLTP dengan surat keterangan nomor 203/SLTP.01.01/MN/2003 yang diterbitkan Kepala SLTP Negeri Kabanjahe Drs Benar Kaban dan dinyatakan lulus 8 Juli 1965.

Dalam surat itu, nama Kena Ukur Surbakti tidak ada, Pa Korbet Surbakti anak dari Nomen Surbakti. Lalu surat keterangan Nomor 156/A-2/STM-1/1982 tanggal 1982 yang diterbitkan Kepsek Menengah Negeri 1 Medan (sekarang SMK Negeri 2 Medan) yang ditandatangani Drs W Radjagoekgoek. Dalam surat keterangan itu, atas nama Kena Ukur Surbakti tapi nama orangtuanya R Surbakti, pada surat pengganti ijazah nama orangtua Nomen, ini sudah berbeda.

Laporan Polisi

Dalam surat keterangan pengganti ijazah ini sama sekali tidak mencantumkan laporan polisi tentang apa penyebab dikeluarkannya surat keterangan dimaksud, tidak mencantumkan nomor seri ijazah, tidak diperbuat bermaterai secukupnya dan foto yang bersangkutan tidak dicap stempel sekolah yang mengeluarkan surat keterangan yang dimaksud, ungkap Sitepu.

Menurut Sitepu, soal keabsahan ijazah Kena Ukur Karo Jambi Surbakti, KPUD Karo telah melanggar peraturan KPU No 68 Tahun 2008, dirubah dengan peraturan KPU No 13 tahun 2010 tentang tahapan pencalonan Pilkada. "Atas hal itu, kami meminta agar DPRD Karo menggunakan hak-haknya seperti bentuk tim Pansus untuk mengungkap secara tuntas soal ijazah Bupati Karo agar tidak membingungkan masyarakat Karo," tegasnya.

Ketua KPUD Karo, Benyamin Pinem ST mengatakan, pihaknya tidak berhak mengumumkan kepada publik soal ijazah administrasi yang disampaikan mulai dari tingkat SD, SMP dan SMK, karena hal itu menyangkut dokumen pribadi dan negara.

"Kami telah memverifikasi secara faktual dan mengklarifikasi setiap sekolah yang menerbitkan ijazahnya sesuai dengan amanah Peraturan KPU Kabupaten Karo No 13 Tahun 2010. Kena Ukur Karo Jambi tamat SD 1962, tamat SMP 1965 dan STM Negeri 1 Medan tamat tahun 1982. Soal detail ijazah Kena Ukur itu tidak dapat kami paparkan di RDP," ujar Benyamin Pinem tanpa menunjukkan dokumen keabsahan ijazah dan surat keterangan pengganti yang diterbitkan setiap sekolah.

Kapolda Sumut yang diwakili Kapolres Tanah Karo AKBP Marcelino Sampouw SH SIK MT mengatakan, berdasarkan Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dari Direktorat Reserse Kriminal Polda Sumut, perihal surat keterangan diduga palsu yang dilaporkan Apintor Pirdaus Peranginangin pada 25 Pebruari 2011, perihal surat keterangan diduga palsu setelah dilakukan penyelidikan tidak dapat ditindaklanjuti ke proses penyidikan, karena tidak dapat ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk proses pidana. "Bila ada bukti, tolong serahkan kepada kami dan kami pun akan segera memprosesnya sampai tuntas," ujarnya.

Menyikapi statmen orang nomor satu di jajaran Polres Tanah Karo itu, Ikuten Sitepu menyatakan akan menyerahkan dokumen dan bukti yang baru ke Kapolda Sumut soal keabsahan ijazah Bupati Karo tersebut. "Kami bersama teman-teman agar dipanggil penyidik dan dimintai keterangan menjadi BAP. Supaya segala bukti yang akami miliki dapat kami serahkan ke penyidik," ungkapnya.

Terkait tuntutan mereka, akhirnya pimpinan rapat Efendi Sinukaban menyatakan sepakat untuk segera dituntaskan keabsahan ijazah Kena Ukur Karo Jambi Surbakti. "Karena sudah ranah hukum, jika ada bukti-bukti lain, segera serahkan ke kepolisian. Kami mempercayakan persoalan ini diselesaikan pihak penegak hukum," tutupnya. (ps)


Sumber :

http://www.analisadaily.com/news/read/2012/05/09/49803/dprd_sepakat_tuntaskan_keabsahan_ijazah_bupati_karo/#.UFFY0K4p9qg (diakses 19 Agustus 2012)



2. Berita tentang infrastruktur yang kurang baik

Sipiso-Piso, Panorama Indah di Tengah Sumatera Utara

[OPINI](#) | 15 June 2012 | 16:49  Dibaca: 139



Betapa indahnya panorama bumi nusantara negeri ini. Penuh pesona, sejuk, dan ,memberi kesan menjadi kenangan indah yang tak terlupakan. Beribu citra yang dihamparkan Allah Subhana wa Ta'ala di negeri kepulauan ini. Salah satunya adalah Sumatera Utara.

Sumatera utara adalah salah satu provinsi yang mempunyai beranekaragam budaya dan pesona alam yang segar untuk santapan perjalanan wisata. Kekhasan adat dan kebiasaan juga membuat takjub. Anda tinggal pilih, Danau Toba yang terhampar luas, eksotis Pulau Samosir, wisata bahari Tapanuli Tengah, dan sebagainya.

Udara sejuk, indahnya suara burung berkicau, hijaunya pohon-pohon, dan ritmis suara percikan keras Air terjun. Itulah salah satu sajian yang ada di objek wisata Air Terjun Sipiso-piso. Objek wisata ini terletak di Kecamatan Merek Kabupaten Karo. Kurang lebih 3 jam perjalanan dari kota Medan dan sekitar 1 jam dari kota Kabanjahe.

Nama Sipiso-piso konon berasal dari kata piso atau pisau. Warga sekitar melihat bentuk air terjun yang menghujam itu mirip dengan sebilah pisau. Saat mandi di dasar air terjun dan merasakan guyuran air serasa seperti dihujani ribuan pisau. Ada juga yang mengatakan bahwa nama Sipiso-piso melekat pada air terjun itu karena lokasinya hanya selemparan batu dari Bukit Sipiso-piso.

Air terjun Sipiso-piso berada di ketinggian lebih kurang 800 meter di atas permukaan air laut. Air terjun ini jatuh dari tebing setinggi 120 meter menuju lembah yang dikelilingi perbukitan dan pohon pinus. Airnya langsung mengalir ke Danau Toba, Desa Tongging yang hanya berjarak 2 kilometer. Itu sebabnya, selain menikmati air terjun, Anda bisa langsung melihat lanskap danau vulkanik terbesar di dunia itu.

Anda bisa menyaksikan keindahan Air Terjun Sipiso-piso dari tebing di atasnya. Di tebing atas juga banyak menyajikan makanan dan souvenir. Namun anda akan jauh lebih terasa nikmat ketika anda turun kebawah. Sekitar 1 kilometer untuk berjalan. disetengah

perjalanan anda akan ada di pos peristirahatan. Butuh waktu kurang lebih satu jam untuk kebawah dan terasa melelahkan. Namun kelelahan itu dibayar dengan keindahan alam Sipiso-piso. Percikan air yang keras membuat suasana terasa menyenangkan. Suara bising air menambah suasana indah air terjun ini.

Anda bisa mengajak teman atau keluarga ke tempat ini. Ketika anda turun, anda harus mempunyai stamina yang kuat. Apalagi ketika pulang dan ingin naik keatas. Anda harus menyimpan stamina anda dari bawah dengan beristirahat sebentar karena perjalanan keatas sangat melelahkan. Namun jika anda tidak sanggup, alangkah baiknya menikmati panorama ini dari atas saja. Itu sudah cukup untuk menghilangkan penat anda dari kesibukan keseharian anda di tempat dimana anda tinggal dan bekerja.

Untuk masuk ke objek wisata ini, anda harus membayar Rp.5000 untuk kendaraan beroda dua. Untuk kendaraan roda empat saya tidak tau, karena belum pernah mencoba.

Apabila anda dari Medan, anda akan melewati daerah Sibolangit, Berastagi, Kabanjahe, dan terus menuju desa Merek. Namun berhati-hatilah ketika berada di desa Tiga Panah, karena jalan rusak penuh lubang sekitar 50 centimeter dengan diameter lebih kurang 1 meter. Apalagi musim hujan, jalanan becek dan licin.

Namun, keindahan pesona Air Terjun Sipiso-piso tidak sebanding dengan kebersihan dan kelayakannya. Sepertinya pemerintah setempat hanya meraup keuntungan saja. Tetapi tidak memperdulikan kebersihan dan penyediaan infrastruktur yang mendukung objek wisata ini. Seperti jalan menuju kebawah yang berbatu dan berbahaya. Tidak ada tiang pegangan tangga sehingga membahayakan orang yang ingin turun atau naik. Padahal setiap tahunnya tempat ini dipenuhi para pengunjung baik lokal, luar daerah, bahkan turis asing.

Ahmad Hakiki

Sumber : <http://wisata.kompasiana.com/jalan-jalan/2012/06/15/sipiso-piso-panorama-indah-di-tengah-sumatera-utara/> (diakses 20 Agustus 2012)

3. Berita tentang Perda Retribusi yang dianggap mencekik masyarakat

Rabu, 23 Mei 2012 00:13 WIB

Perda Karo Tidak Pro Rakyat, Tarif Retribusi IMB Naik 800 Persen

Kabanjahe, (Analisa). Kebijakan Bupati Karo Dr (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) daerah setempat dengan menaikkan tarif retribusi melalui Peraturan Daerah (Perda) tahun anggaran 2012 melambung tinggi hingga 800 persen. Perda ini terkesan membebani masyarakat dan dinilai tidak pro rakyat.

Salah satu Perda Karo Nomor 6 tahun 2012 tentang retribusi perizinan tertentu dalam hal Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dinilai sangat mahal bagi masyarakat, khususnya bagi kalangan masyarakat perekonomian tingkat bawah.

Perda Kabupaten Karo Nomor 7 tahun 2006, tentang retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Kota Kabanjahe, Berastagi, ibukota kecamatan dan sepanjang jalan protokol ditetapkan seperti bangunan rumah tempat tinggal (hunian) tidak bertingkat dan atau bertingkat seperti permanen (luks) Rp 1.500/M², permanen Rp 1.250/M², semi permanen Rp 1.000/M², permanen (luks) bawah Rp 1.500/M², permanen (luks) atas Rp 1.650/M², permanen bawah Rp 1.200/M², permanen atas Rp. 1.250/M², semi permanen bawah Rp 1.000/M², semipermanen atas Rp 1.100/M².

Perda Kabupaten Karo Nomor 7 tahun 2012 saat ini, tarif retribusi IMB untuk bangunan baru di Kabanjahe dan Berastagi, ibu kota kecamatan dan sepanjang jalan protokol rata-rata sangat mahal dibanding perda sebelumnya.

Seperti bangunan permanen (luks) Rp 12.000 M², permanen Rp 10.000/M², semi permanen Rp 8.000 M², permanen (luks) bawah Rp 12.000 M², permanen (luks) atas Rp 13.000/M², permanen bawah (Rp. 9600/m²), permanen atas (Rp 10.000/m², semi permanen bawah Rp 8.000/m², semipermanen atas Rp 8.800/m², hingga kenaikan tarif retribusi untuk IMB di Kabupaten Karo mencapai 800 persen.

Bila masyarakat untuk mengurus tarif retribusi untuk membangun rumah ukuran permanen dengan luas 200 M² dengan tarif Rp 10.000/M² harus mengeluarkan kost minimal Rp 2.000.000, belum lagi pengeluaran lainnya yang tidak terduga.

Pengurusan IMB diintansi terkait bukan lagi rahasia umum, pengurusannya jauh dari ketentuan Perda. Begitu mahalnya tarif retribusi itu, masyarakat perekonomian tingkat bawah bakal enggan untuk mengurus IMB.

Meski mahal tarif retribusi Perda Kabupaten Karo Nomo 6 tahun 2012 yang tidak memiliki IMB, tidak ada sanksi yang tegas dan mengikat seperti pembongkaran bangunan. Sesuai peraturan Bab XVIII, pada ketentuan pidana kepada wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, hingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak 3 kali jumlah retribusi. Sementara hingga saat penyidik PNS di lingkungan Pemkab Karo belum dibentuk.

Padahal, dalam perda itu bila seorang warga yang tidak memiliki IMB belum tentu merugikan keuangan negara.

Pada Perda Kabupaten Karo Nomor 7 tahun 2006, sanksi yang diberikan sangat tegas yakni, setiap bangunan yang sedang dibangun dan atau telah selesai dibangun milik perorangan dan atau badan hukum yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan ataupun keberadaannya melewati garis sempadan dan ataupun keberadaannya mengakibatkan terganggunya kepentingan umum dapat dikenakan sanksi pembongkaran bangunan dengan tata cara sebagai berikut, teguran secara tertulis berturut-turut maksimal 3 kali, jangka waktu teguran 7 hari setiap teguran.

Bila setelah diadakan suatu peringatan dalam bentuk teguran sebanyak tiga kali, tetapi pelanggar atau pemilik bangunan tidak mengindahkan peringatan dimaksud, bupati dapat memerintahkan pembongkaran bangunan dimaksud dengan biaya pembongkaran dibebankan kepada pemilik bangunan.

Ketika hal itu dikonfirmasi Kepala Kantor Perizinan Terpadu, Ramos Peranginangin SP kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (21/5) mengatakan tarif retribusi IMB itu tidak terlalu mahal, karena tarif retribusi IMB saat ini tidak lagi dikutip uang sepadan. (ps)

Sumber : <http://www.analisadaily.com/mobile/read/?id=52063> (diakses 20 Agustus 2012)

Berikut contoh *press conference* yang dibuat oleh bagian Humas Pemkab Karo yang sudah diterbitkan di situs www.mediacenter.karokab.go.id :

15 Mobil Internet Masuk Lahan Pertanian



Gambar : Pelaksana Tugas (Plt) Gubsu H. Gatot Pujo Nugroho me nyerahkan 15 unit Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (M-PLIK) kepada lima Pemkab di Sumatera Utara, di halaman kantor Bupati Karo, Jalan Jamin Ginting Kabanjahe, Senin, (31/10).

Lima Kabupaten yang memperoleh M-PLIK dalam penyerahan kemarin diantaranya, Kabupaten Karo mendapatkan empat unit, Dairi tiga unit, Pakpak Barat tiga unit, Humbahas tiga unit, dan Samosir dua unit.

Serah terima operasional mobile pusat layanan internet kecamatan di Kabupaten Karo ini merupakan tahap ketiga, kepada lima Kabupaten se-Sumatera Utara dari 96 unit M-PLIK, dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kemenkominfo).

M-PLIK diberikan kepada provinsi Sumatera Utara untuk mengurangi kesenjangan sarana dan pemerataan akses telekomunikasi bagi masyarakat, guna mendukung pem bangunan pedesaan dengan pengembangan kawasan agropolitan.

Mengingat mayoritas penduduk Sumut yang menggantungkan hidup dari sektor pertanian, revitalisasi pertanian sangat strategis untuk dilaksanakan guna memacu pembangunan pedesaan dengan pengembangan kawasan agropolitan yaitu mengubah kawasan pedesaan menjadi kota pertanian yang berkembang dan mampu meningkatkan pembangunan wilayah sekitarnya.

Kabupaten Karo, Dairi, Pakpak Barat, Samosir, Toba Samosir, Taput, Simalungun,

Pematang Siantar dan Humbang Hasundutan adalah kabupaten/kota yang masuk dalam pengembangan kawasan agropolitan di Sumut. Guna mendukung program itu, dibutuhkan teknologi informasi yang dapat menjangkau seluruh pelosok pedesaan. Dengan biaya murah dan akses yang baik.

Pemberian M-PLIK ini merupakan upaya pemerintah untuk menopang program pengembangan kawasan agropolitan Sumut sehingga dapat dijadikan sebagai media kontak langsung pemerintah kepada masyarakat melalui proses penyebaran informasi yang dapat mendukung percepatan pembangunan bidang komunikasi dan informatika. Dengan demikian diharapkan tidak adalagi kesenjangan informasi yang dihadapi masyarakat di Sumut karena kondisi geografis.

Mobil layanan internet kecamatan, diterima Bupati Karo Dr (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti, Wakil Bupati Pakpak Barat Ir. Maju Padang, Wakil Bupati Humbahas Drs. Marganti Manunllang, Dairi oleh Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Pakpak Barat Drs. Wesly P. Manullang dan Samosir oleh Kabid Kominfo Dinas Perhubungan dan Kominfo Samosir Hotman Sagala.

Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan bantuan dari Menteri Komunikasi dan Informatika RI itu dilengkapi parabola, perangkat komputer (laptop), generator listrik dan peralatan teknologi canggih lainnya, sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengakses informasi di seluruh kawasan, termasuk daerah-daerah yang belum terjangkau sarana telekomunikasi (blankspot).

Atas nama masyarakat Kabupaten Karo, Bupati Karo Dr (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti menyampaikan terima kasih dan berjanji akan memanfaatkan MPLIK bagi peningkatan layanan teknologi di kecamatan terpencil secara mobile (RS/Bidang Komunikasi dan Publikasi Dinas Kominfo dan PDE Kab. Karo).

Berikut release yang pernah dibuat oleh informan 4 yang sudah diterbitkan di beberapa media massa dan di situs www.mediacenter.karokab.go.id (*mediacenter.karokab.go.id/.../111-mobil-siaran-keliling*) sebagai berikut :

MENKOMINFO BERI BANTUAN MOBIL KELILING UNTUK KARO



Keterangan gambar : Menkominfo Tifatul Sembiring dan Kepala Dinas Kominfo dan PDE Kabupaten Karo, Drs Robert Peranginangin, saat wawancara dengan sejumlah wartawan di depan gedung Kominfo.

Kabupaten Karo merupakan satu-satunya kabupaten di Sumatera Utara, yang menerima bantuan mobil siaran keliling dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.

Satu unit mobil siaran keliling ini secara langsung diserahkan Menkominfo, Ir Tifatul Sembiring kepada Bupati Karo diwakili Kepala Dinas Kominfo dan PDE Kabupaten Karo, Drs Robert Perangin-angin MSi, Senin di gedung serba guna Kementerian Kominfo Jalan Merdeka Barat Jakarta.

Bantuan mobil siaran keliling diserahkan Menteri Komunikasi dan Informatika sebanyak 20 unit yang diberikan kepada kabupaten/ kota di Indonesia.

Pemberian bantuan mobil siaran keliling ini merupakan bentuk apresiasi Kementerian Komunikasi dan Informatika terhadap kinerja Bupati Karo DR (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti yang selama ini dinilai sudah bekerja dengan sangat baik dalam membangun Kabupaten Karo.

Bantuan mobil keliling ini diberikan untuk lebih mendukung kinerja Bupati Karo dalam melaksanakan program-program pembangunan di Kabupaten Karo dan mendekatkan pemerintah daerah dengan masyarakat setempat.

Bantuan mobil keliling tersebut sarana mendekatkan pemerintah dengan masyarakat termasuk mensosialisasikan program pemerintah."Fungsikan mobil ini sebaik mungkin dan

prioritaskan masyarakat pelosok pedesaan dan kecamatan yang jauh dari jangkauan ibukota kabupaten,"harap Sembiring seperti disampaikan Kadis Kominfo dan PDE Pemkab Karo, Drs Robert Perangin-angin, kepada wartawan, Selasa (5/6) di Kabanjahe.

Mobil siaran keliling yang diserahkan tersebut dilengkapi peralatan pendukung di antaranya LCD projector, note book, modem GSM, printer, generator, handy talky UHF, DVD player, sound system, kamera digital dan lampu darurat.



Berikut ini salah satu bentuk kegiatan *press interview* yang dilakukan Humas Pemkab Karo ketika memfasilitasi *press interview* antara KPU Kabanjahe dengan wartawan terkait ijazah palsu Bupati Karo :

KPU Karo : Persyaratan Calon Bupati Sudah Sesuai UU

Saturday, 05 May 2012 09:49 Sumatera Utara



KPU Kabupaten Karo, mengklaim persyaratan pencalonan ke 10 pasangan calon Bupati Karo, termasuk Kena Ukur Karo Jambi Surbakti pada Pemilihan Umum (Pemilu) Kepala Daerah Kabupaten Karo periode 2010- 2015 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Kami telah memverifikasi dan mengklarifikasi setiap sekolah yang menerbitkan ijazahnya atau SKPI bagi calon yang tidak memiliki ijazah sesuai dengan amanah Peraturan KPU Kabupaten Karo No 13 Tahun 2010,” ujar Ketua KPU Kabupaten Karo, Benyamin Pinem ST didampingi Kadis Kominfo dan PDE Kabupaten Karo, Robert Peranginangin, SPd MSi di ruang kerjanya, Kamis (3/5) menjawab sejumlah pertanyaan wartawan.

Ketika disinggung, ada pihak-pihak yang mengatakan SKPI Kena Ukur Karo Jambi Surbakti tidak lazim, dengan lantang Ketua KPU Karo, Benyamin Pinem ST langsung menyela “Yang mengatakan tidak lazim siapa?” pungkasnya.

Terpisah, Bupati Karo, DR (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti saat dikonfirmasi di halaman kantor bupati, terkait adanya tuduhan dugaan menggunakan ijazah palsu, mengatakan, dia tidak pernah menggunakan ijazah palsu. “Tidak pernah saya menggunakan ijazah palsu,” tegasnya.

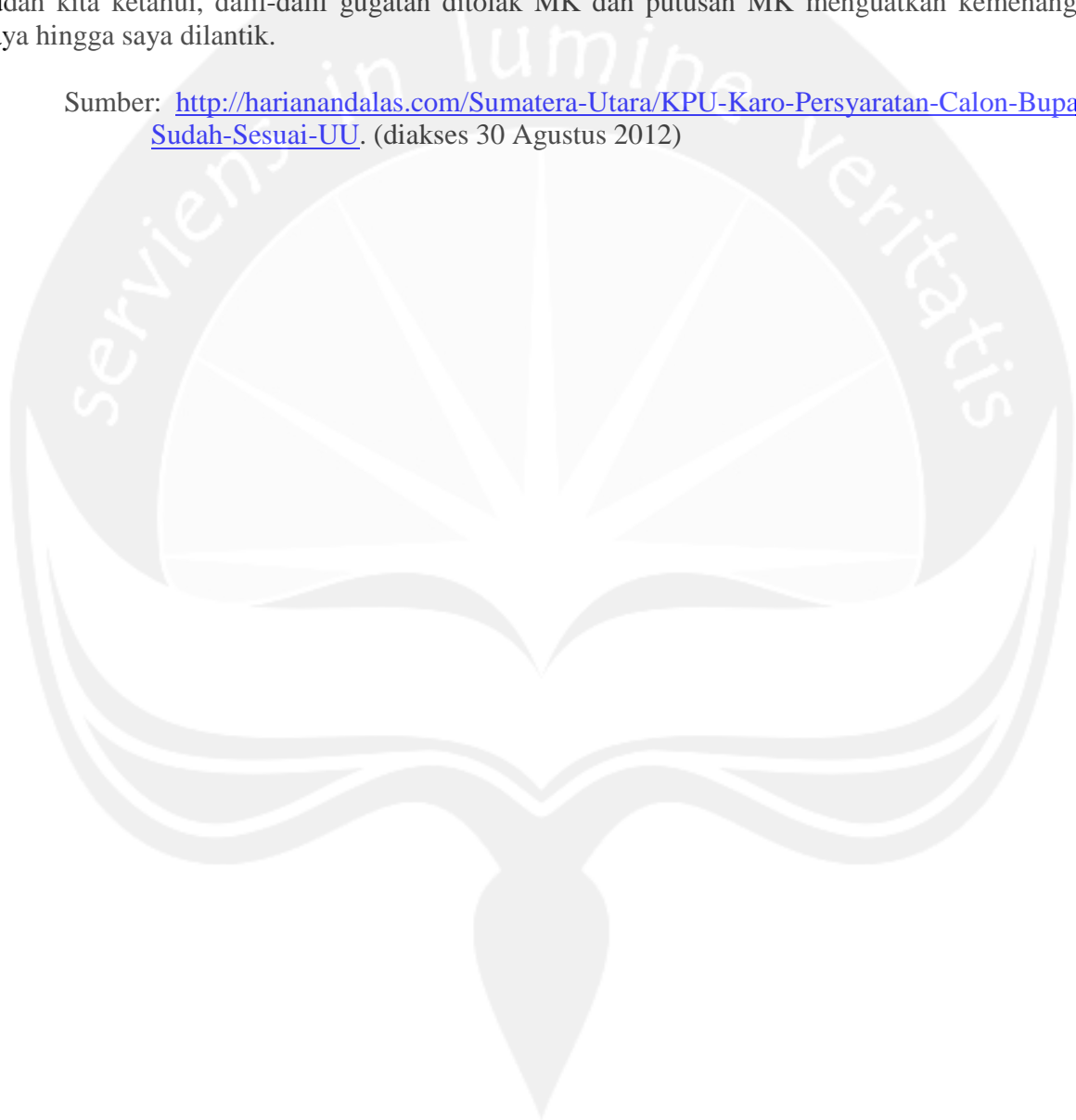
Disebutkan, tahun 1982 kehidupannya susah. Saat itu, sedikitpun tidak ada niat mau menjadi pejabat, terpikir saja tidak ada menjadi pejabat. "Nah, tahun 1998 setelah sukses di perantauan, saya kembali ke Medan dan mengambil Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) di bekas sekolah saya sebagai kenang-kenangan, karena tahun 1982 ijazah saya hilang di atas kapal," urainya.

Tahun 2003, saya diajak teman terjun ke dunia politik dari Partai Golkar menjadi anggota DPRD Karo. Pada saat itu, berkas saya (SKPI) lolos verifikasi, namun saat itu tidak terpilih.

Pada Pemilu Kada 2005 saya mencalonkan diri menjadi Bupati Karo dengan berkas SKPI yang sama dan juga lolos verifikasi oleh KPU Kabupaten Karo, namun tidak terpilih. Tahun 2008 saya kembali ikut calon legislatif dengan SKPI yang sama dan terpilih sebagai anggota DPRD Karo.

Tahun 2010, dari anggota DPRD saya kembali ikut bertarung di Pemilu Kada Kabupaten Karo periode 2010-2015 dan akhirnya terpilih sebagai pemenang menjadi Bupati Karo juga dengan SKPI yang sama. Sebelum dilantik sebagai bupati, ada gugatan dari pihak yang kalah dalam Pilkada, termasuk mempersoalkan legalitas ijazah saya ke MK. Hasilnya sama-sama sudah kita ketahui, dalil-dalil gugatan ditolak MK dan putusan MK menguatkan kemenangan saya hingga saya dilantik.

Sumber: <http://harianandalas.com/Sumatera-Utara/KPU-Karo-Persyaratan-Calon-Bupati-Sudah-Sesuai-UU>. (diakses 30 Agustus 2012)



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Ditujukan Kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan PDE Kab Karo
Nama Kegiatan Konferensi Pers Serah Terima Mobil Siaran Keliling
Hari/Tanggal Senin, 4 Juni 2012
Tempat Ruang Rapat Asisten Bupati Karo
Hasil Kegiatan

Konferensi Pers adalah kegiatan mengundang kalangan jurnalistik dengan maksud untuk penyebarluasan informasi kebijakan Pemerintah Daerah dan memberi pemahaman kepada masyarakat ataupun untuk menghindarkan adanya kesenjangan informasi di masyarakat atas penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Daerah, pembangunan dan kemasyarakatan dengan tujuan agar tercapainya informasi melalui media secara efektif sampai kepada masyarakat sehingga terciptanya peran serta masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Karo

Kegiatan konferensi Pers ini dilaksanakan terkait dengan serah terima bantuan mobil siaran keliling dari Kementerian Komunikasi dan Informatika kepada Pemerintah Kabupaten Karo. Pemberian bantuan mobil siaran keliling ini merupakan bentuk apresiasi Kementerian Komunikasi dan Informatika terhadap kinerja Bupati Karo DR (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti yang selama ini dinilai sudah bekerja dengan sangat baik dalam membangun Kabupaten Karo. Bantuan mobil keliling ini diberikan untuk lebih mendukung kinerja Bupati Karo dalam melaksanakan program-program pembangunan di Karo dan mendekatkan pemerintah daerah dengan masyarakat di Kabupaten Karo. Kabupaten Karo merupakan satu-satunya kabupaten di provinsi Sumatera Utara yang menerima bantuan mobil siaran keliling dari Kementerian Komunikasi dan Informatika

Terkait dengan pemberian bantuan mobil siaran keliling tersebut, Bupati Karo memberikan keterangan pers kepada rekan-rekan wartawan-wartawan dari berbagai media yang disertai dengan pemberian snack. Hasil konferensi pers yang diadakan tersebut adalah terbitnya berita di media massa tentang Pemkab Karo menerima bantuan mobil siaran keliling dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Kabanjahe, 6 Juni 2012

PPTK/ Kepala Bidang Komunikasi dan Publikasi



D/s. JHONSON TARIGAN
PÉMBINA

NIP. 19640519 199303 1 004

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Ditujukan Kepada : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan PDE Kab. Karo
Nama Kegiatan : Konferensi Pers Klarifikasi Keabsahan Ijasah Bupati Karo
Hari/Tanggal : Kamis, 3 Mei 2012
Tempat : Kantor KPU Kabanjahe
Hasil Kegiatan :

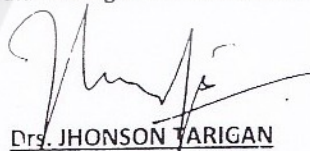
Konferensi Pers adalah kegiatan mengundang kalangan jurnalistik dengan maksud untuk penyebarluasan informasi kebijakan Pemerintah Daerah dan memberi pemahaman kepada masyarakat ataupun untuk menghindarkan adanya kesenjangan informasi di masyarakat atas penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Daerah, pembangunan dan kemasyarakatan dengan tujuan agar tercapainya informasi melalui media secara efektif sampai kepada masyarakat sehingga terciptanya peran serta masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Karo.

Kegiatan konferensi Pers dilaksanakan terkait dengan adanya pemberitaan dan demonstrasi yang berkaitan dengan keabsahan ijasah Bupati Karo DR (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti. Pada konferensi pers ini secara tegas Bupati Karo menyatakan bahwa beliau tidak menggunakan ijasah palsu namun ijasah aslinya hilang dan diperkuat dengan surat keterangan pengganti ijasah. Surat Keterangan Pengganti Ijasah ini sudah diperiksa oleh KPUD Kab Karo dan dinyatakan sah. Hal ini diperkuat dengan keputusan Komisi Penilaian Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Karo bahwa dalam pendaftaran sebagai calon Bupati Karo semua sudah sesuai dengan prosedur, aturan, dan mekanisme yang berlaku sesuai Peraturan KPU Pusat terkait tahapan PemiluKada Karo. Secara tegas Bupati Karo menyatakan bahwa pihak yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa PemiluKada yaitu Mahkamah Konstitusi juga telah menyatakan pasangan Kena Ukur Karo Jambi Surbakti-Terkelin Berahmana syah untuk menang.

Selain memberikan penjelasan, Bupati Karo juga memberi kesempatan untuk melakukan tanya jawab dengan rekan-rekan wartawan-wartawan yang hadir. Acara konferensi pers ini disertai dengan pemberian snack dengan rekan-rekan wartawan yang hadir. Hasil konferensi pers yang diadakan tersebut adalah terbitnya berita di media massa tentang bantahan Bupati Karo dalam penggunaan ijasah palsu.

Kabanjahe, 8 Mei 2012

PPTK/ Kepala Bidang Komunikasi dan Publikasi


Drs. JHONSON TARIGAN

PEMBINA

NIP. 19640519 199303 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PDE
JALAN LETJEN DJAMIN GINTING No. 17 LT. III TELP. (0628) 324456
KABANJAHE 22113

Kabanjahe, 31 Mei 2012

No : 003 /Hms /V/2012

Kepada Yth.

Sifat : Biasa

Sdr. _____

Lamp. : 1 (satu)

di -

Perihal : Undangan Pers

Tempat

1. Sehubungan dengan Pelaksanaan Serah Terima Bantuan Mobil Siaran Keliling dari Menkominfo kepada Pemerintah Kabupaten Karo, bersama ini mengundang saudara/i. guna menghadiri kegiatan konferensi Pers Serah Terima Bantuan Mobil Siaran Keliling yang diadakan pada :

Hari/ Tanggal : Jumat, 1 Juni 2012
Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Asisten Bupati Karo
Acara : Serah Terima Bantuan Mobil Siaran Keliling

2. Demikian hal ini disampaikan dan kehadiran saudara diharapkan tepat waktu, atas perhatian saudara diucapkan terimakasih.

An Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
dan PDE Kabupaten Karo
Kepala Bidang Komunikasi dan Publikasi



R. DR. HONSON TARIGAN

PEMBINA

NIP. 19640519 199303 1 004



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

PEMERINTAH KABUPATEN KARO
Tahun Anggaran 2012

NOMOR DFA SKPD					
1.25	01	01	15	5	2

Ususan Pemerintahan : 1.25 - 1.25
 Organisasi : 1.25 - 1.25.01
 Program : 1.25 - 1.25.01.01
 Kegiatan : 1.25 - 1.25.01.01.15
 Lokasi Kegiatan : Dinas Komunikasi, Informatika dan PDE Kab. Karo
 Sumber Dana : 10 Silpa

Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika
 Dinas Komunikasi, Informatika dan PDE
 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-Undangan

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
TOLAK UKUR KINERJA**

INDIKATOR	TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM Pelayanan Administrasi Perkantoran	85 % Rp. 45.400.000
MASUKAN Jumlah Baku	1 tahun
KELUARAN Terselangnya Bahan Baku dan Peraturan Perundang-Undangan	85 %
HASIL Memenuhi Pengalokasian dan Informasi Pegawai	90 %
MANFAAT Memenuhi wawasan dan pengetahuan pegawai	90 %
DAMPAK Terceptanya minat Baca	

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika dan PDE Kab. Karo

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (1)
		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1		3	4	5	6 =	
5	BELANJA					
5.2	BELANJA LANGSUNG					
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor					
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	420	Eksemplar/Tahun	100.000,00		
	Belanja Surat Kabar dan Majalah	300	Eksemplar/Tahun	10.000,00		
	Belanja Koran (35 Eksemplar x 12 bulan)					
	Majalah Tenah (25 Eksemplar x 12 bulan)					
	Buku Peraturan/Penundang-undangan	2	Eksemplar	200.000,00		

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)	
	Volume	Satuan	Harga Satuan		
06	Anggota 2 orang			6 = 3 x 5	
			150.000,00	300.000,00	
07	Belanja Barang dan Jasa			130.935.000,00	
		Belanja Bahan/Material		30.400.000,00	
	Belanja Bendera, Spanduk dan Umbul - umbul		30.400.000,00	30.400.000,00	
	Belanja Spanduk			30.400.000,00	
	- Spanduk Digital Ukuran 6 meter x Rp. 45.000,	20	buah	270.000,00	5.400.000,00
	- Spanduk Kejasama Polka Samud dengan Pernakab Karo	5	buah	3.500.000,00	17.500.000,00
	- Biaya Perawatan Spanduk Kejasama Polka Samud dengan Pernakab Karo (selama masa validasi)	5	balok	1.500.000,00	7.500.000,00
	Belanja Jasa Kantor			100.135.000,00	
	Belanja Jasa Publikasi			100.135.000,00	
	Konferensi Pers			24.500.000,00	
- Uang Saku (10 org x 10 keg)	400	O/K	50.000,00	20.000.000,00	
- Snack (60 org x 10 keg)	600	O/K	7.500,00	4.500.000,00	
Jasa Penyebaran Informasi Melalui Iklan			52.200.000,00		
- Iklan Penda di Media Massa	4350	mm/km	12.000,00	52.200.000,00	
Jasa Penyebaran Informasi melalui realisasi				23.835.000,00	
- Berita terbit 1-2 hari setelah kegiatan (berita bergambar)	125	berita	50.000,00	6.250.000,00	
- Berita terbit 1-2 hari setelah kegiatan (berita tidak bergambar)	150	berita	40.000,00	6.000.000,00	
- Berita terbit 3-7 hari setelah kegiatan (berita bergambar)	100	berita	40.000,00	4.000.000,00	
- Berita terbit 3-7 hari setelah kegiatan (berita tidak bergambar)	131	berita	35.000,00	4.585.000,00	
- Berita dalam bentuk laporan khusus pembangunan Kal. Karo di setiap sektor (Minimal 5000 Karakter)	15	berita	200.000,00	3.000.000,00	

45
130.935

